

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman (Helmy, 2004).

Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan. Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan kepedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur desa seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telpon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang.

Usaha mikro dan kecil merupakan usaha yang paling banyak digeluti di Indonesia. Usahaini terbukti mampu menopang perekonomian rumah tangga miskin dan bisa menjadi penyangga ekonomi nasional. Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Produk Domestik Bruto (PDB)

Indonesia Tahun 2007 tumbuh sebesar 6,3% terhadap Tahun 2006. Bila dirinci menurut skala usaha, pertumbuhan PDB Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mencapai 6,4% dan Usaha Besar (UB) tumbuh 6,2%. Dibandingkan Tahun 2006 pertumbuhan PDB UKM hanya 5,7%, dan PDB UB hanya 5,2%. Pada Tahun 2007 total nilai PDB Indonesia mencapai Rp3.957,4 triliun, dimana UKM memberikan kontribusi 2.121,3 triliun rupiah atau 53,6% dari total PDB Indonesia. Pertumbuhan PDB UKM Tahun 2007 terjadi di semua sektor ekonomi. Jumlah populasi UKM pada tahun 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha, atau 99,99% terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia (BPS dan Kemenegkop UKM, 2008).

Besarnya peran UKM harus diikuti dengan adanya pembinaan kepada berbagai kelemahan dan permasalahan yang dihadapinya. Salah satu permasalahan yang dihadapi UKM adalah terbatasnya akses UKM kepada sumber daya produktif. Akses kepada sumber daya produktif terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Jika dilihat dari kenyataan per kredit nasional dalam hal pendanaan, produk jasa lembaga keuangan sebagian besar masih berupa kredit modal kerja, sedangkan untuk kredit investasi sangat terbatas. Bagi UKM keadaan ini sulit untuk meningkatkan kapasitas usaha ataupun mengembangkan produk-produk yang bersaing. Di samping persyaratan pinjamannya juga tidak mudah dipenuhi, seperti jumlah jaminan meskipun usahanya layak, maka dunia perbankan yang merupakan sumber pendanaan terbesar masih memandang UKM sebagai kegiatan yang beresiko tinggi. Pada tahun 2003, untuk skala pinjaman dari

perbankan sampai dengan jumlah 50 juta rupiah, terserap hanya sekitar 24% ke sektor produktif, selebihnya terserap ke sektor konsumtif (Bappenas, 2008).

Pertumbuhan ekonomi wilayah tidak terlepas dari pengaruh kinerja masyarakat di daerah tersebut. Keberadaan masyarakat miskin erat hubungannya dengan tingkat pendapatan dan pengangguran serta distribusi pendapatan yang tidak merata yang terjadi di daerah perdesaan terlihat relatif lebih tinggi tingkat penganggurannya. Hal ini terjadi karena kurangnya keterampilan masyarakat itu sendiri dan rendahnya akses masyarakat terhadap modal untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kegiatan ekonomi produktif. Hal tersebut akhirnya akan berpengaruh terhadap kesenjangan masyarakat maupun kesenjangan antar wilayah (Todaro, 2004).

Upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih mampu menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mengubah pola pikir serta sikap mental mereka. Melalui upaya terpadu ini, diharapkan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kelompok kehidupannya serta membantu dan memberdayakan mereka dalam berbagai kegiatan produktif yang sesuai dengan potensinya masing-masing. Kesulitan untuk memperoleh akses tersebut merupakan salah satu penyebab mengapa tingkat kesejahteraan atau pendapatan masyarakat miskin tetap rendah. Oleh sebab itu, dalam sebuah program yang akan dalam pelaksanaannya harus lebih mengutamakan swakelola, dalam pengertiannya masyarakat lokal mendapat peluang yang seluas-luasnya untuk mengelola kegiatan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhannya. Mereka dapat dengan mudah mengakses fasilitas yang dibuat untuk mereka. Selain itu, perencanaan yang dipakai adalah "*bottom-up planning*" atau perencanaan pembangunan yang

disusun dari bawah ke atas maka rencana pembangunan meliputi program dan proyek yang benar-benar dibutuhkan dan melibatkan masyarakat lokal dalam rencana pembangunan (Adisasmita, 2006:4).

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinir. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan (P3KBPM-PNPM Mandiri, 2010).

Dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan, pembangunan pedesaan tidak terlepas dari pembangunan sumber daya manusianya serta pemberdayaan masyarakat pedesaan. Sebagaimana skala prioritas pembangunan pedesaan yang berbasis pada pengembangan pedesaan (rural based development), meliputi (Helmy, 2014) : a) Pengembangan ekonomi lokal, b) Pemberdayaan masyarakat, c) Pembangunan prasarana dan sarana, d) Pengembangan kelembagaan.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan, efektivitasnya terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Untuk itu melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis

pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien (Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2008).

PNPM-MPd merupakan jenis program dari pemerintah pusat untuk memberdayakan masyarakat di pedesaan yang bersifat devolusi berupa dana yang dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) maupun kelompok untuk jenis kegiatan infrastruktur, ekonomi dan pendidikan. Kegiatan ekonomi berupa pemberian kredit kepada kelompok-kelompok masyarakat dengan beranggotakan perempuan yang disebut dengan SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan).

Berdasarkan Bahan Bacaan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2009 dijelaskan bahwa Kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) merupakan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Kelompok tersebut seperti Kelompok Majelis Ta'lim, Kelompok Dasawisma, Kelompok arisan/julo-julo dan kelompok-kelompok yang beranggotakan perempuan lainnya.

Persyaratan Kelompok yang dapat mengajukan pinjaman SPP adalah sebagai berikut : a) Kelompok harus berumur minimal 1 (satu) tahun, b) Kelompok beranggotakan minimal 7 orang dan maksimal sesuai dengan kemampuan dan kondisi kelompok, b) Kelompok kaum perempuan yang memiliki kegiatan simpan pinjam, kegiatan pinjaman dan aturan mengenai simpanan dan pinjaman dalam suatu wilayah jorong/nagari yang nama kelompoknya jelas, ada kepengurusan dan ada anggotanya. c) Kelompok tersebut diakui legalitasnya oleh pemerintah setempat. d) Setiap kelompok harus mempunyai modal yang antara

lain berasal dari simpanan pokok, wajib atau sukarela anggotanya yang dapat digunakan sebagai dana tanggung renteng.

Keunggulan pinjaman kelompok melalui dana SPP ini adalah sebagai berikut : a) Adanya kemudahan dalam pengajuan dan tanpa syarat agunan. b) dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman, c) Bunga relatif kecil dan dibawah standar lokal yaitu 10% d) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan, e) Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan, sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan, e) kuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam terdapat 46 buah Kelompok SPP yang tersebar pada 7 Nagari, sebagaimana rinciannya dapat dilihat padatable 1 berikut ini :

Tabel 1. Data Kelompok SPP di Kecamatan IV Koto

No	Nagari	Jumlah	Ket
1	Koto Tuo	8	
2	Balingka	14	
3	Sungai Landia	5	
4	Koto Panjang	9	
5	Sianok VI Suku	3	
6	Koto Gadang	5	
7	Guguak Tabek Sarajo	2	
Jumlah		46	

Sumber : Kecamatan IV Koto Dalam Angka 2014

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk (1) Mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan; (2) Akses pendanaan usaha skala mikro; (3) Pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar; (4) Memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan; (5) Mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk 1) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar; 2) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha; 3) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Bertitik tolak dari hal-hal yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini akan menganalisis : **“Analisis Implementasi Kegiatan SPP PNPM-MPd Terhadap Ekonomi Keluarga di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam (Studi Kasus Kelompok SPP Aster dan Usaha Keluarga Mandiri)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, pada tahun 2007 pemerintah telah menetapkan suatu Program PNPM-MP dengan salah satu kegiatannya adalah kegiatan SPP. Di Kecamatan IV Koto, kegiatan ini telah terlaksana mulai tahun 2007 sampai dengan sekarang.

Dengan telah terlaksananya kegiatan SPP di Kecamatan IV Koto lebih kurang 8 tahun, tentunya diharapkan dapat memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan SPP itu sendiri. Namun kondisi saat ini masih ditemukan masyarakat miskin khususnya di Kecamatan IV Koto yaitu 1.601KK, dengan rincian sebagaimana tabel 2 berikut :

Tabel 2. Jumlah KK Miskin Per Nagari

No	Nagari	Jumlah KK Miskin	Ket
1	Koto Tuo	111	
2	Balingka	582	
3	Sungai Landia	183	
4	Koto Panjang	275	
5	Sianok VI Suku	213	
6	Koto Gadang	151	
7	Guguak Tabek Sarajo	86	
	Jumlah	1.601	

Sumber : Data Kemiskinan Kantor Camat IV Koto 2015

Terkait perkembangan kelompok SPP, secara realita dapat dilihat dilapangan bahwa ada kelompok SPP yang dapat berkembang dengan baik dan tidak mempunyai kendala dalam pengembalian angsuran pinjaman kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang ada di tingkat kecamatan seperti Kelompok SPP Aster Kampuang Pisang Nagari Koto Panjang, namunada juga kelompok SPP yang pasif serta mengalami kemacetan dalam pengembalian angsuran pinjaman seperti Kelompok SPP Usaha Keluarga Mandiri Pahambatan Nagari Balingka.

Sekaitan dengan hal tersebut di atas, maka pada penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah implementasi kegiatan SPP pada Kelompok SPP di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam?
- b. Bagaimanakah manfaat kegiatan SPP terhadap ekonomi keluarga anggota Kelompok SPP di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mendiskripsikan implementasi kegiatan SPP pada Kelompok SPP di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

- b. Menganalisis manfaat kegiatan SPP terhadap ekonomi keluarga anggota Kelompok SPP di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan dalam penyusunan rencana atau program pemberdayaan masyarakat berupa bantuan modal usaha untuk masyarakat menengah ke bawah.
- b. Sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk mendalami masalah bantuan pinjaman dalam persoalan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

